

Surat Kabar : Kompas  
Subyek : Gunung Merapi

Edisi : 27 Januari 2012  
Halaman : 22

### MERAPI

#### Korban Erupsi Merapi Mengadu ke Sultan

YOGYAKARTA, KOMPAS - Sebanyak 12 perwakilan warga korban Merapi dari tiga dusun di Desa Glagaharjo, Cangkringan, Kabupaten Sleman, yang tak bersedia direlokasi, mengadu ke Gubernur DIY Sultan Hamengku Buwono, Kamis (26/1), di Kepatihan, Yogyakarta. Mereka meminta penjelasan dari pemerintah yang sejak erupsi 2010 tidak membangun sarana dan prasarana umum di kawasan mereka.

Sekretaris Desa Glagaharjo Agralno mengatakan, warga Dusun Kalitengah Lor, Kalitengah Kidul, dan Srunen minta kejelasan kepada Pemprov DIY tentang nasib mereka yang tak mendapat perhatian dari pemerintah. "Wilayah kami seperti dikucilkan. Kami juga berharap menerima fasilitas pemerintah seperti korban erupsi lainnya," kata Agralno.

Sampai saat ini sekitar 500 keluarga di tiga dusun itu tidak bersedia direlokasi. Padahal, tiga dusun ini masuk kawasan rawan bencana. "Warga tidak mau direlokasi karena kehidupan sudah pulih. Contohnya, produksi susu sapi yang sebelum erupsi 5.000 liter per hari sekarang sudah mulai pulih menjadi 4.000 liter per hari," tuturnya.

Selain itu, mata pencarian utama warga sebagai peternak, secara swadaya warga tiga dusun ini juga sudah memasang instalasi listrik dan air bersih. Aliran air berasal dari mata air Bebung yang diperbaiki setelah sebelumnya rusak tersapu lahar Merapi.

Menurut Agralno, dengan teknologi mitigasi bencana kian canggih, pemerintah sebenarnya dapat memberikan informasi bencana lebih awal. Meskipun demikian, mereka tidak menerima fasilitas apa pun dari pemerintah seperti korban erupsi lainnya di hunian sementara.

Bahkan, di Dusun Srunen sudah berdiri satu sekolah dasar (SD) yang dibangun dengan dana bantuan sponsor. Akan tetapi, sampai sekarang sekolah tersebut tidak dipakai.

"Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Sleman juga tidak mengirimkan guru ke SD Srunen. Alasannya, bertentangan dengan UU Rencana Tata Ruang Wilayah. Biarpun perih, kami akhirnya harus menerima hal ini," kata Agralno. Warga Srunen dan sekitarnya setiap hari harus mengantar anak-anak mereka ke sekolah darurat di hunian sementara Banjarsari yang jaraknya mencapai 7 kilometer.

Gubernur DIY Sultan Hamengku Buwono X mengatakan, sesuai UU Rencana Tata Ruang Wilayah, pemerintah daerah tidak bisa memfasilitasi apa pun kepada warga tiga dusun di Glagaharjo. Peralnya, sesuai UU, baik warga yang tinggal di wilayah yang dikosongkan maupun pemda yang memfasilitasi kawasan yang dikosongkan akan terancam pidana. "Pemerintah pusat masih menunda dan ingin mencari jalan keluar dengan apa yang disebut hidup harmoni di daerah bencana. Kalau warga Glagaharjo punya kesepakatan dan konsep hidup harmonis di daerah bencana, saya bisa meyakinkan pemerintah pusat bahwa hidup harmonis di daerah bencana tidak melanggar UU," ujarnya. (ABK)